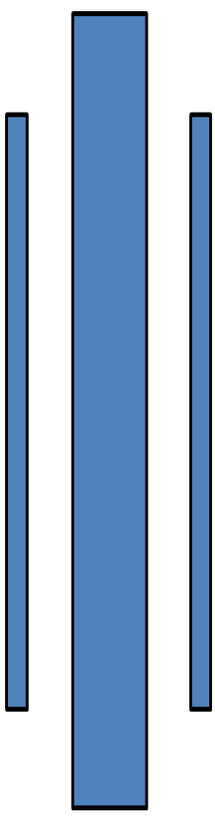
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan KutowinangunTahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

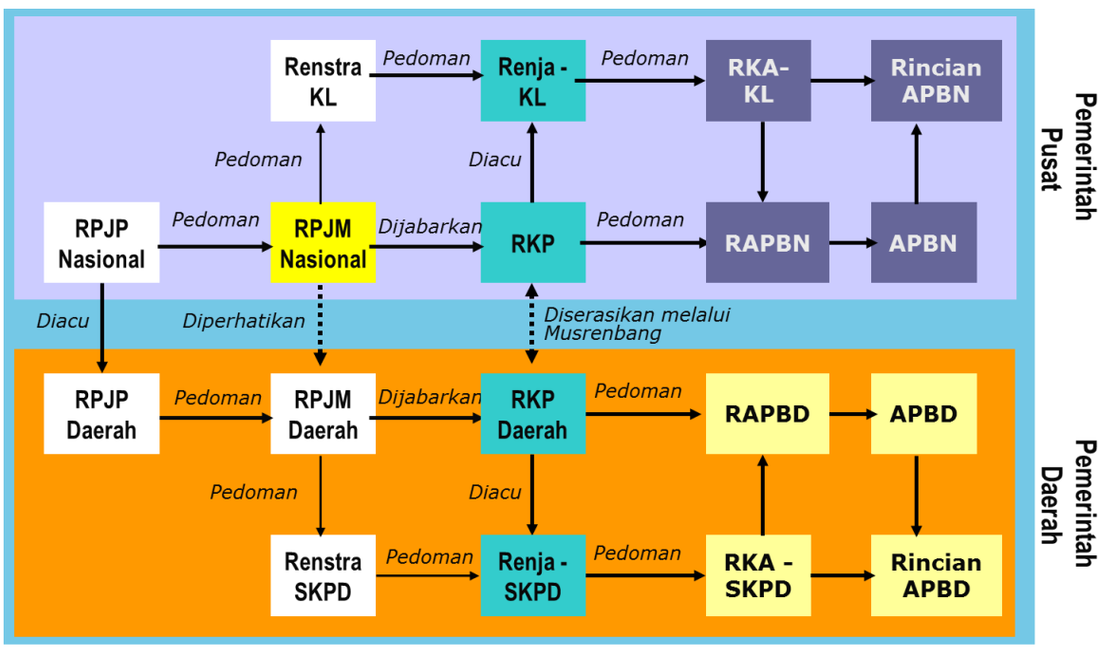
Dokumen Renstra KecamatanKutowinangunTahun 2016-2021ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra KecamatanKutowinangun Tahun 2016-2021harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Kutowinangun disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuangdalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Kutowinangun dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan

akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kutowinangun untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan KutowinangunTahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031; dan

4. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Perturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64,);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Kutowinangun yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun adalah :

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kutowinangun berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD;
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutowinangun beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 tahun;
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan KutowinangunTahun 2016-2021 terdiri dari 7 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANANKECAMATANKUTOWINANGUN

Bab ini menguraikan Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Kutowinangun, sumberdaya yang dimiliki serta kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI

Pada bab ini dituangkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, identifikasi issue-issue strategis (Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan issue strategis.
(Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan issue strategis.

BABIV VISI, MISI, TUJUANDAN SASARAN, STRAREGIDAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kutowinangun, serta perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Kutowinangun.

BAB V RENCANA PROGRAMDAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF**.**

Menguraikan rencana program dan berapa rencana kegiatan untuk mendukung indikator sasaran yang ada beserta kerangka pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJAKECAMATAN KUTOWINANGUNYANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD.
Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

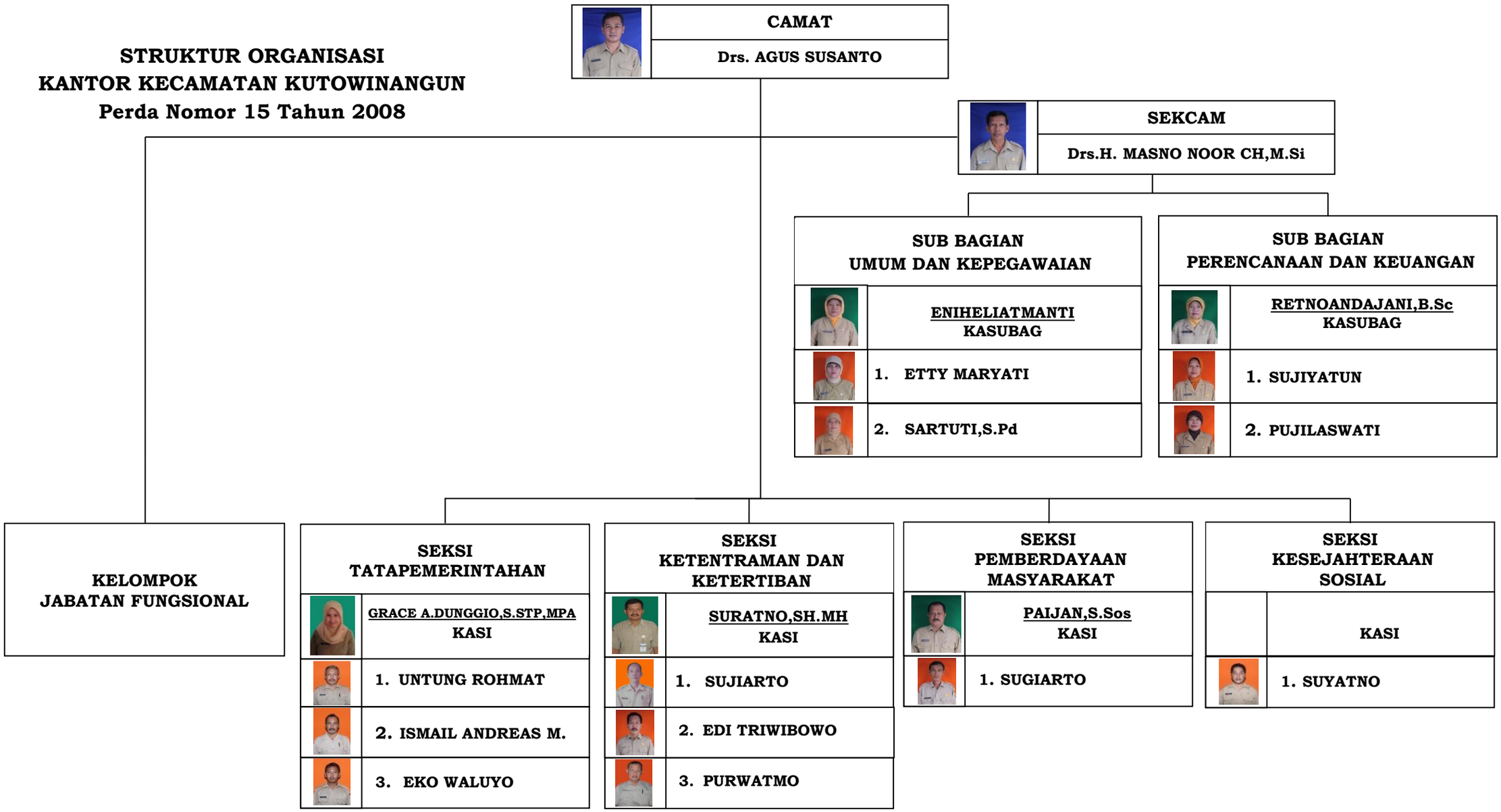
LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN

A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Kutowinangun

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Kutowinangun tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar2.1.Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan tertuang pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata KerjaKecamatan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2016 KecamatanKutowinangun



Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Camat Kutowinangun,Sekretariat di Kecamatan atau tingkat seksi di Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut :

1. Camat;

   Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

   Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Kutowinangun mempunyai fungsi sebagai berikut :

   1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   3. pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   6. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
   7. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
   8. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
   9. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
   10. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
   11. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   12. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
   13. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yangbelum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
   14. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan; dan
   15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada mayarakat di kecamatan;
i. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayahkecamatan;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusansurat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan danpembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi TataPemerintahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
l. administrasi desa dan/atau kelurahan;
m. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaanketentraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman danKetertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman danketertiban wilayah;
b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsaserta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
e. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;

f. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
h. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
i. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
l. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
m. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan,pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi PemberdayaanMasyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayahkerjanya;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencanadan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi KesejahteraanSosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayahkerjanya; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatann (PATEN) di Kabupaten Kebumen maka Kecamatan Kutowinangun mempunyai kewenangan seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel

Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
PELAYANAN PERIZINAN	1. Pemberian Rekomendasi Izin Tempat Keramaian; 2. Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Banguan dengan luas lebih atau sama dengan 50 m^2(lima puluh meter persegi); 3. Pemberian Rekomendasi Izin Gangguan dengan luas lebih atau sama dengan 50 m^2 (lima puluh meter persegi); 4. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk banguan dengan luas kurang dari 50 m^2 (lima puluh meter persegi) tidak bertingkat dan non investasi; 5. Penerbitan Izin Gangguan yang berdampak kecil dengan luas kurang dari 50^2 (lima puluh meter persegi);

BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
	6. Penerbitan Rekomendasi bagi Pembelian Terbatas Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk kategori Kelompok Usaha Kecil lainnya;
PELAYANAN NON PERIZINZN	1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk; 2. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan; 3. Peenerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia Antar Kecamatan; 4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan; 5. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah; 6. Penerbitan Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran; 7. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 8. Penerbitan Surat Keterangan Kuliah Kerja Nyata, survey dan penelitian; 9. Pemberian Legalisasi Pengajuan Pindah Penduduk Keluar Daerah; 10. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris; 11. Pemberian Legalisasi Proposal; 12. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar.

B. Sumber Daya Yang Dimiliki

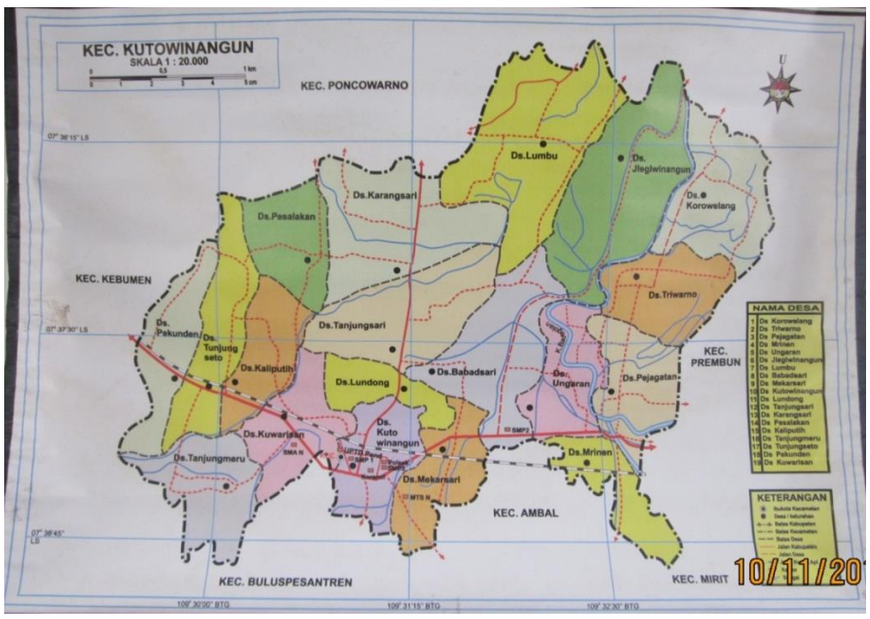
1. Sumber Daya Alam/Lingkungan

Berdasarkan data Kecamatan Kutowinangun Dalam Angka Tahun 2015,secara geografis,Kecamatan Kutowinangun terletak pada 7^{o}45,5’ LintangSelatan dan 109^{o}37,0’ Bujur Timur. Luas Wilayah Kecamatan Kutowinangun 3.373 Ha atau 33,73 Km^{2} yang terbagi menjadi 19 wilayah administrasi desa. Desa terluas adalah Lumbu sebesar 328 Ha atau 9,72 persen dari luas Kecamatan Kutowinangun, dan desa paling kecil adalah desa Lundong sebesar 101 Ha atau 2,99 persen dari luas Kecamatan Kutowinangun. Dari luas sebesar 3.373 Ha tersebut terdiri dari lahan sawah 1.436,71 Ha atau 42,6 persen dan lahan kering 1.937,29 Ha atau 57,4 persen.

Menurut system irigasinya lahan sawah di Kecamatan Kutowinangun sebagian besar sudah menggunakan irigasi teknis yang bisa ditanami padi dua kali dalam satu tahun yaitu seluas 906,96 Ha. Lahan sawah yang belum menggunakan irigasi atau tadah hujan seluas 528,75 Ha yang hanya bisa ditanami padi sekali dalam satu tahun, yang di gunakan bangunan atau pekarangan 1.252,2 Ha dan tanaman Durian, tanaman tembakaudan lain-lain 685,1 Ha.

Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen ± 12 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Prembun
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Poncowarno
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambal



Gambar 1
Peta Administrasi Kecamatan Kutowinangun

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan KutowinangunDari aspek demografi penduduk Kecamatan Kutowinangun berjumlah 42.348 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 20.695 jiwa dan Perempuan berjumlah 21.653 jiwa.Strata pendidikan penduduk Kecamatan Kutowinangun terdiri dari Pendidikan SD 15.980 jiwa, Pendidikan setingkat SLTP berjumlah 7.641 jiwa, Pendidikan setingkat SLTA berjumlah 6.74 jiwa, Pendidikan setingkat perguruan tinggi Akademi/Diploma berjumlah 709 jiwa dan Sarjana berjumlah 833 jiwa.Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada diwilayah Kecamatan Kutowinangun terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu) swasta PKU Muhammadiyah, Puskesmas rawat inap sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2(dua) buah dan Polindes/PKD di setiap desa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Kutowinangun Terdapat 2 (dua) pasar di pusat kota kecamatan yang terletak di Desa Kutowinangun, 1 (satu) pasar di Desa Pejagatan dan 1 (satu) buah pasar desa dan1(satu) buah pasar ikan di Desa Ungaran. Disamping itu Kecamatan Kutowinangun juga terdapat lembaga keuangan seperti BPD, BRI, BKK, Pegadaian, Kantor Pos,UPK dan KUD.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Kutowinangun, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi.Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkanberbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Kutowinangun disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi Sumberdaya Manusia pada Kecamatan Kutowinangun Awal Tahun 2016

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN						DIKLAT YG DIIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1/D 3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK TURAL	FUNGSIO NAL	JML
ESLON III	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	2
ESELON IV	-	5	-	-	-	5	2	1/1	1	-	-	5	3	-	3
STAF	-	11	3	-	-	14	-	1/1	13	-	-	15	1	-	1
THL	-	-	-	-	3	3	-	0	2	-	1	3	-	-	-
JUMLAH	2	16	3	-	3	24	3	2/2	16	-	1	24	-	-	-
% DARI JML PEG	8,3	66,7	12,5	-	12,5	-	12,5	8,3/ 8,3	66,7	-	4,1	-	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Kecamatan Kutowinangun belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Apabila setiap seksi ada 3 (tiga) personil maka total kebutuhan pegawai negeri sipil mestinya berjumlah 12 (dua belas) orang. Berarti Kecamatan Kutowinangun masih kekurangan pegawai sejumlah 5 (lima) orang.

Guna mengatasi hal tersebut, maka Kecamatan Kutowinangun melakukan perekrutan tenaga harian lepas dimana pada tahun 2016 kondisinya berjumlah 3 (tiga) orang.

Disamping itu masih ada seksi kesejahteraan sosial yang kosong dan dua orang stafnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang bisa optimal.

3. Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan belum cukup memadai disamping itu banyak sarana prasarana yang perlu peremajaan dan pengadaan serta perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Secara detail, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data awal tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2Data Sumberdaya Sarana dan Prasarana

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JML			
Gedung							
Tanah Bangunan Kantor 3.992 m^2	1	-	-	1	1	-	-
Instalasi Listrik	5000 W	-	-	5000 W	-	-	-
Ruang Kasi	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
Ruang Pelayanan dan Sekretariat	**1**	**-**	**-**	**1**	**2**	**1**	**-**
Pendopo dan Rumah Dinas	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
Gedung PKK	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
Kendaraan							
Mobil	1	-	-	1	1	-	-
Sepeda Motor	-	5	-	5	7	2	-
Genset	2	-	-	2	2	-	-
Sarpras Elektronik							
AC Split	3	-	-	3	5	2	-
Sound System	1	1	-	2	3	1	-
Kamera	1	-	-	1	2	1	-
Server	2	-	-	2	2	-	-
LCD		-	-	1	2	1	-
PC Komputer	-	2	3	5	5	3	-
Note Book	1	-	-	1	2	1	-
Laptop	4	-	-	4	7	3	-
Printer	-	5	-	5	7	2	-
Sarpras Kantor							
Almari	11	-	-	11	15	4	-
Meja Kerja	49	4	-	53	57	4	-
Meja Rapat	-	-	-	-	180	51	-
Kursi	129	-	-	129	180	-	-
Zice	2	-	-	2	3	1	-

Jenis sarana dan prasarana yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional Kecamatan Kutowinangun meliputi ruang dan peralatan kerja, saran telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan yang memadai sehingga perlu penambahan sarana dan prasarana. Secara lengkap kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Kutowinangun dapat dilihat pada tabel 2.2.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutowinangun sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada renstra periode 2010-2015.

Secara total, pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 125,8 %. dari seluruh indikator tersebut ada 21 indikator yang capainnya 90 % ke atas sedangkan yang capaiannya di bawah 90 % ada 7 indikator. Indikator yang capaiannya di bawah 90 % disebabkan oleh Realisasi Anggaran yang diterima lebih kecil dari Anggaran di Renstra.

Beberapa upaya keras yang telah dilakukan terkait pelaksanaan kinerja yaitu pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Tribulanan di Tingkat Kabupaten.

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK 2015	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015*	2011	2012	2013	2014	2015
					A	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**f/a**	**g/b**	**h/c**	**i/d**	**j/e**
1.	Jasa Surat menyurat				500	600	700	800	1000	500	600	700	800	1000	100	100	100	100	100
2.	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				7500	7500	8000	8000	8500	7500	18500	12500	125000	15000	100	246	156	156	187,5
3.	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas				12000	16000	13500	14000	15000	12000	11600	11160	25000	25000	100	72,5	82,6	178,5	166,6
4.	Jasa Administrasi Keuangan				8000	8000	9000	10000	10000	8000	8000	11880	11880	11880	100	100	132	118,8	118,8
5.	Jasa Kebersihan Kantor				1000	1500	2000	2500	3000	1000	1500	2000	2500	3000	100	100	100	100	100
6.	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				2000	2000	2500	3000	3000	2000	2000	2000	2000	3000	100	100	80	66,6	100
7.	Alat Tulis Kantor				2000	2872	3000	3500	3500	2000	2872	2680	3740	3500	100	100	89,3	92,5	100
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2000	2000	2500	3000	3000	2000	2000	2000	2500	3000	100	100	66,6	83,3	100
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik				1000	1000	1500	2000	2500	1000	1000	1000	2100	2500	100	100	66,6	105	100
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan				960	960	960	1200	1200	960	960	1080	1080	1200	100	100	112,5	90	100
11.	Penyediaan Makan Minum Rapat				6000	6000	8000	8000	10000	6000	6000	6000	6000	7000	100	100	75	75	70
12.	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi dalam daerah				7000	7000	8500	9000	10000	7040	7000	7000	13000	11200	100,5	100	82,3	144	112
13.	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi luar daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				15000	14000	15000	30000	35000	15000	24000	7961	0	0	100	171,4	53	0	0
15.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				2000	2500	2500	3000	3000	2000	2500	5000	16500	13000	100	100	200	550	433
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana				10700	5000	13000	14000	15000	15700	10000	0	47401	0	146,7	200	0	310	0
17.	Pengadaan Mebeleur				0	0	0	0	0	0	1000	0	4500	4000	0	0	0	0	0
18.	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor				2000	2000	3000	3000	3000	2000	2000	2201	25369	22322	100	100	73,3	845	744
19.	Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
20.	Penyusunan Database Profil Desa				6000	5000	6000	6000	6000	6000	5000	5400	7000	8000	100	100	90	116,6	133,3
21.	Fasilitasi APBDes				10000	9000	25000	25000	30000	10000	9000	19000	20900	21000	100	100	76	83,6	70
22.	Penyelenggaraan Musrenbangcam				9000	9000	12000	14000	14000	9000	9000	12800	14080	15000	100	100	106,6	100,5	107,1
23.	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa				0	0	0	0	0	0	0	6250	6875	7000	0	0	0	0	0

No.	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK 2015	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015*	2011	2012	2013	2014	2015
24.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan				3000	0	3500	4000	4000	3000	0	0	0	2000	100	0	0	0	50
25.	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK				2000	2000	4000	4000	5000	2000	2000	3000	3000	3000	100	100	75	75	60
26.	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa				3000	3000	4000	5000	5000	3000	3000	4000	4000	4000	100	100	100	80	80
27.	Pembinaan Pengendalian Linmas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	
28.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa				0	0	9000	0	2000	0	0	18000	0	0	0	200	0	0	0
29.	Fasilitasi Program Pembangunan				0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
30.	Koordinasi Perumusan Kebijakan TKP2Kdes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
31.	PATEN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ktowinangun , 2015
*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun Kecamatan Kutowinangun mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya.Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkanadaefisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan KutowinangunKabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Ribuan Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015*	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
1. Belanja Tidak Langsung																	
a. Belanja Pegawai	1.531.322	1.542.954	1.701.261	1.898.392	2.057.955	1.471.402	1.540.094	1.590.023	1.843.810	1.982.819	96	96,68	93,46	97,12	96,34		
2. Belanja Langsung	117.700	129.532	143.612	248.925	194.602	114.489	117.544	139.820	246.520	193.004	97,72	90,7	97,3	96,18	99,17		
a. Belanja Pegawai	17.913	17.052	31.591	38.618	33.596	17.893	17.032	31.531	38.619	33.596	99,8	99,8	98,81	99,81	100		
b. Belanja Barang dan Jasa	67.087	74.980	99.060	136.867	144.006	63.896	63.012	95.328	134.461	142.408	95	84	96,24	98,24	98,89		
c. Belanja Modal	32.700	37.500	12.961	73.440	17.000	32.700	37.500	12.961	73.440	17.000	100	100	100	100	100		

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kutowinangun , 2015

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sebelum menentukan issue strategis perlu diidentifikasi permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja berdasarkan tupoksi, faktor yangmempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas &Fungsi Pelayanan SKPD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutowinangun

Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indikator kinerja seperti : Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran; Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai;. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan; Tersedianya database kecamatan; Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif; Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan; Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Desa; Prosentase warga yang berperan dalam politik dan Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani.

Secara lengkap Identifikasi Permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna-kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indik. program) 1. Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	IKK Renstra (100%)	-	Alokasi APBD kabupaten	-
2.Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	70%	IKK Renstra (83%)	SDM pengguna	Alokasi APBD kabupaten	Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembang kec.	10 dokumen	IKK Renstra (20 dok)	SDM Penyusun	Regulasi sering berganti; Bintek Perenc.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen
3. Tersedianya database kecamatan	5 dokumen	IKK Renstra (14 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Sulitnya pencarian data

4.Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	5 dokumen	IKK Renstra (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
5. Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	5 dokumen	IKK Renstra (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
7.Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	50%	IKK Renstra (100%)	- Kapasitas SDM dalam pendampingan desa	Fasilitasi dari kabupaten, alokasi anggaran APBD Kab	Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
8.Prosentase warga yang berperan dalam politik	100%	IKK Renstra (100%)	SDM pendamping dan pengawas dari kec	Sosialisasi dari kab; alokasi anggaran APBD	Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades yang lebih menarik;
9.Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100%	IKK Renstra (100%)	SDM Pengelola;	SOP yang jelas; Ketersediaan Sarpras; Alokasi anggaran APBD kab	Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kpd masyarakat; Belum memadainya Sarpras

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Kecamatan Kutowinangun antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras;
2. Kurangnya kerjasama Tim dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan adanya kerja tim;
3. Sulitnya pencarian data yang akurat;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan yang melibatkan masyarakat;
5. Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa;
6. Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades yang lebih menarik;
7. Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kepada masyarakat;
8. Belum memadainya Sarpras PATEN.

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa Issue strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Penyebaran paham Radikalisme	Lunturnya rasa Nasionalisme	Belum optimalnya kegitan pembinaan dan pelatihan anggota linmas, pembinaan karangtaruna dan organisasi kepemudaan	
2	Isu kewarganegaraan ganda Mulai Dicanangkannya MEA	Isu 20 juta penduduk belum ber KTP. Belum bisa bersaing dengan Ekonomi Lokal	Belum optimalnya pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan aparatur	

C. Telaah Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kecamatan Kutowinangun mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 1,2,4 dan 6yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Kecamatan Kutowinangundapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pembinaan pada Karangtarun a	Adanya Pemuda sudah punya wadah karangtarua
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kemasyarakat	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga-lembaga desa

Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesejangan ekonomi			
Program Peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan	Belum optimalnya peran anggota Linmas	Kurangnya pembinaan pada anggota Linmas	Adanya anggota Linmas di setiap Desa
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekomoni yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum tersedianya data penduduk miskin yang up to date	Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengeta-huan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnyanya kualitas sumber daya manusia		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasaran a aparatur yang memadai		
Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua sumber daya manusia berperan aktif dalam proses penyusunan dok perencanaan dan evaluasi pembangunan		
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum terdokumennya database secara kontinue dan up to date		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kurangnya sosialisasi kemasyarakat Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat	Kurang tersedianya anggaran Kurangnya pemahaman masayarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada.	Adanya lembaga-lembaga desa Tersedianya sumber daya manusia yang

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Belum optimalnya peran PKK dalam pembangunan.	Kurangnya anggaran yang tersedia	Adanya wadah perkumpulan perempuan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KTP, KK dan akte kelahiran	Tersedianya anggaran yang mencukupi
Program perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat perencanaan pembangunan	Tersedianya anggaran yang mencukupi.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Belum tercukupinya anggaran yang tersedia;
   Pada Kecamatan Kutowinangun sebagian besar anggaran yang tersedia pada setiap kegiatan belum tercukupi.
2. Kurangnya pembinaan pada karangtaruna;
   Masalah tersebut disebabkan dana pembinaan yang ada belum mencukupi.
3. Kurangnya pembinaan anggota Linmas, disebabkan dana pembinaan yang ada belum mencukupi;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada, ini merupakan salah satu penghambat pembangunan di Kecamatan Kutowinangun, karena masyarakat tidak banyak terlibat didalamnya.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain :

1. Tersedianya dana dari Pemerintah Daerah, meskipun dana tersebut sebagian besar untuk melaksanakan kegiatan belum dapat mencukupinya;
2. Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan, dengan adanya sumber daya manusia dalam melakukan pendataan penduduk miskin merupakan faktor pendorong tersusunnya data penduduk miskin di Kecamatan Kutowinangun;
3. Adanya wadah pemuda, adanya anggota Linmas pada setiap Desa, adanya lembaga-lembaga desa, adanya wadah perkumpulan perempuan, merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kutowinangun.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Kecamatan Kutowinangun tersebut dapat ditentukan beberapa issue strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai;
2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh SDM yang terkait;

3. Penyusunan database Kecamatan Kutowinangun secara kontinue dan uptodate;
4. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan APBD lebih optimal;
5. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. Visi

Visi Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Dalam rangkapencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan

ke depan, serta memperhitungkan peluangyang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Kutowinangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 1, 2, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Kecamatan Kutowinangun.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Kutowinangundapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Program)	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;		Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.				Tersedianya jasa surat menyurat (dokumen)		1000000	1200000	1300000	1800000	2100000	2400000	2600000	
2.				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)		15000000	13000000	15000000	18000000	20000000	22000000	23000000	
3.				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)		25000000	27000000	27000000	30000000	32000000	34000000	35000000	
4.				Tersedianya jasa administrasi keuangan (orang)		11880000	15000000	16000000	19000000	21000000	23000000	25000000	
5.				Tersedianya jasa kebersihan kantor (paket)		3000000	3500000	3500000	5000000	6000000	7500000	9000000	
6.				Tersedianya jasa peralatan kerja (paket)		3000000	3000000	3000000	5000000	6000000	7000000	7500000	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Program)	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7.				Tersedianya alat tulis kantor (Paket)		3500000	4000000	5000000	6000000	7000000	8000000	9000000	
8.				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (paket)		3000000	3422000	3643000	5000000	6000000	7000000	8000000	
9.				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan banguunan kantor(paket)		2500000	2500000	2500000	4000000	5000000	6000000	6500000	
10.				Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan (bulan)		1200000	1500000	1500000	1600000	1700000	1800000	1800000	
11.				Tersedianya makanan dan minuman (orang kali)		7000000	10000000	10000000	14000000	15000000	16000000	18000000	
12.				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (orang kali)			2000000	2000000	4000000	4000000	4000000	5000000	
13.				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (orang kali)		11200000	10000000	12000000	14000000	15000000	17000000	19000000	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur									

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Program)	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
14.				Tersedianya mebeleur kantor (unit)		4000000	4000000	4000000	5000000	10000000	15000000	20000000	
15.				Tersedianya sarana prasarana kantor (paket)		13000000	20500000	12000000	14000000	18000000	20000000	20000000	
16.				Terpeliharanya gedung kantor (unit)		22322000	66168000	4200000	40000000	40000000	50000000	60000000	
17.				Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor (paket)			7200000						
18.				Tersedianya kendaraan dinasoperasional (unit)(masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)					20000000	20000000	20000000		
19.	Meningkatkan pengembangan data informasi/ statistik untuk penyusunan dan pengumpulan data\informasi kebutuhan dokumen perencanaan		Meningkatnyapengembangan data informasi/statistik untuk penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renstra, Renja, LKJIP		3000000	4000000	6000000	7000000	10000000	12000000	14000000	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Program)	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
20.	Meningkatkan dukungan kebutuhan data base dan profil desa dan Kecamatan		Meningkatnya dukungan kebutuhan data base dan profil desa dan Kecamatan	Tersedianya Data Base dan Profil desa/Kecamatan		8000000	7500000	8170000	8000000	11000000	13000000	14000000	
21.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan		MeningkatnyaPemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa (tahun 2017 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2017)			2000000	6000000		34000000			
22.	Meningkatnya Fasilitasi program pembangunan perdesaan		Meningkatnya Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terselenggaranya Fasilitasi Program Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan				19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	
23.	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Meningkatnya Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Anggota Linmas yang terlatih (Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)		2000000			9500000	9500000	7500000	8000000	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Program)	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
24.	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (TKP2KDes)		Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (TKP2KDes)	Tersedianya Data Kemiskinan		3000000	5700000	6650000	8000000	9000000	10000000	12000000	
25.	Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan		Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan		2000000	3000000		4000000	7500000	8000000	9000000	
26.	Meningkatkan Pembinaan Sosial Masyarakat		Meningkatnya Pembinaan Sosial Masyarakat	Terbinanya Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat, Terselenggaranya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Keagamaan			4000000	4500000	6000000	9000000	10000000	11000000	
27.	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI Kecamatan			9000000	9000000	10000000	14000000	15000000	17000000	
28.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Fasilitasi Program Pembangunan	Terfasilitasinya dan Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan APBDesa		21000000	43700000	26600000	27000000	30000000	32000000	34000000	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Program)	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
29.	Meningkatkan Fasilitasi program pembangunan		Meningkatnya Fasilitas Program Pembangunan Di Desa	Terfasilitasinya Program Pembangunan Di Desa			8500000	7600000	9000000	15000000	18000000	20000000	
30.	Meningkatkan Kemampuan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Meningkatnya Kemampuan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terbinanya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Administrasi Desa(Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)		4000000			10000000	12000000	14000000	16000000	
31.	Meningkatkan Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa		Meningkatkan Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa	TerfasilitasinyaFasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa (Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)					10000000	15000000	15000000	15000000	
32.	Meningkatkan Peran Perempuan di Perdesaan		Meningkatnya Kegiatan Peran Perempuan di Perdesaan	Terbinanya Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa		3000000	38000000	56800000	5000000	5000000	6000000	6000000	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Program)	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
33.	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			62615000	54000000	65000000	70000000	75000000	80000000	
34.	Meningkatkan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik		Meningkatnya Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	Terfasilitasinya Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik (INOVIK)					5000000	7000000	9000000	10000000	
35.	Meningkatkan Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasinya Musrenbangdes dan Musrenbangcam		15000000	17100000	19000000	20000000	25000000	28000000	30000000	
36.				Terinventarisirnya Program Masuk Desa (IPMD)		7000000	5000000	4750000	5000000	11000000	13000000	15000000	

Sumber :Data primer diolah

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah.Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan.Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan koordinasi pelayanan administrasi, sarana dan prasarana yang memadai Misi 2 : Mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN, memiliki profesionalisme, etos kerja dan disiplin tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan prima Misi 4 : Mewujudkan lingkungan bersih dan asri guna mendukung Kebumen Beriman				
1.	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;	a. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat b. Melaksanakan PATEN dan Program e-KTP secara optimal.	Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan; Misi 5 : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)				
2.	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Desa dan Kelurahan;	Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 6 : Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat				
3.	Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnyakoordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	a. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan; c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan; d. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan;	Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Sumber :Data primer diolah

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kecamatan Kutowinangun berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program *(outcome)* di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Program pengembangan data/informasi;
5. Program perencanaan pembangunan daerah;
6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
9. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
11. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik;

12. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
13. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
14. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
15. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
16. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makanan dan minuman;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
14. Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional;
15. Pengadaan mebeleur;
16. Pengadaan sarana dan prasarana kantor (Paket);
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
18. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
19. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan;
20. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan;
21. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
22. Penyelenggaraan Pembinaan Linmas se-Kecamatan Kutowinangun;
23. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (TKP2Kdes);
24. Pembinaan Orgnisasi Kepemudaan;
25. Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat;
26. Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
27. Fasilitasi APBDes;
28. Fasilitasi Program Pembangunan di Desa;
29. Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;
30. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa;
31. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
32. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public (INOVIK);
33. Penyelenggaraan Musrenbangcam;
34. Inventarisasi Program Masuk Desa (IMPD).

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

Tabel

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan KutowinangunKabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai target rencana kerja operasional	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (dokumen)	1000000	264 bh	1200000	300 bh	1300000	350 bh	1800000	370 bh	2100000	450 bh	2400000	530 bh	2600000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	15000000	12 bln	13000000	12 bln	15000000	12 bln	18000000	12 bln	20000000	12 bln	22000000	12 bln	23000000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)	25000000	1 mobil 5 motor	27000000	1 mobil 5 motor	27000000	1 mobil 5 motor	30000000	1 mobil 5 motor	32000000	1 mobil 5 motor	34000000	1 mobil 5 motor	35000000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi perkantoran (orang)	11880000	11 orang	15000000	11 orang	16000000	11 orang	19000000	11 orang	21000000	11 orang	23000000	11 orang	25000000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (paket)	3000000	12 bln	3500000	12 bln	3500000	12 bln	5000000	12 bln	6000000	12 bln	7500000	12 bln	9000000
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan kerja (paket)	3000000	10 komputer 7 printer 1 mesin ketik	3000000	12 komputer 87 printer 1 mesin ketik	3000000	14 komputer 7 printer 1 mesin ketik	5000000	14 komputer 7 printer 1 mesin ketik	6000000	14 komputer 7 printer 1 mesin ketik	7000000	14 komputer 7 printer 1 mesin ketik	7500000
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Paket)	3500000	12 bln	4000000	12 bln	5000000	12 bln	6000000	12 bln	7000000	12 bln	8000000	12 bln	9000000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (paket)	3000000	12 bln	3422000	12 bln	3643000	12 bln	5000000	12 bln	6000000	12 bln	7000000	12 bln	8000000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan banguunan kantor(paket)	2500000	12 bln	2500000	12 bln	2500000	12 bln	4000000	12 bln	5000000	12 bln	6000000	12 bln	6500000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan (bulan)	1200000	12 bln	1500000	12 bln	1500000	12 bln	1600000	12 bln	1700000	12 bln	1800000	12 bln	1800000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (orang kali)	7000000	12 bln	10000000	12 bln	10000000	12 bln	14000000	12 bln	15000000	12 bln	16000000	12 bln	18000000
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (orang kali)		12 bln	2000000	12 bln	2000000	12 bln	4000000	12 bln	4000000	12 bln	4000000	12 bln	5000000
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (orang kali)	11200000	12 bln	10000000	12 bln	12000000	12 bln	14000000	12 bln	15000000	12 bln	17000000	12 bln	19000000
		Persentase pemenuhan prasarana sarana perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur													
			Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinasoperasional (unit) (Masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)						1 sepeda motor	20000000	1 sepeda motor	20000000	1 sepeda motor	20000000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor (unit)	4000000	10 kursi	4000000	10 kurs 2 meja eselon	4000000	10 kursi	5000000	10 kursi	10000000	20 kurs rapat	15000000	20 kursi rapat	20000000
			Pengadaan sarana dan prasarana kantor (Paket)	Tersedianya sarana prasarana kantor (paket)	13000000	3 laptop 2 printer	20500000	2 laptop 1 Ac	12000000	2 komputer 1 Ac	14000000	2 meja eselon	18000000	10 kursi kerja	20000000	20 kursi kerja	20000000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	22322000	Gedung kantor dan rumah dinas	66168000	Gedung kantor dan rumah dinas	4200000	Gedung kantor dan rumah dinas	40000000	Gedung kantor dan rumah dinas	40000000	Gedung kantor dan rumah dinas	5000000	Gedung kantor dan rumah dinas	60000000
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabilitasinya gedung kantor		Teralis Kantor	7200000										
Meningkatkan pengembangan data informasi /statistik untuk penyusunan dan pengumpulan data\informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Meningkatnyapengembangan data informasi/ statistik untuk penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Tercapainya penyusunan kebutuhan dokumen perencanaan	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renstra, Renja, LKJIP	3000000	4 dokumen	4000000	4 dokumen	6000000	4 dokumen	7000000	4 dokumen	10000000	4 dokumen	12000000	4 dokumen	14000000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Meningkatkan dukungan kebutuhan data base dan profil desa dan Kecamatan	Meningkatnya dukungan kebutuhan data base dan profil desa dan Kecamatan	Terwujudnya dukungan kebutuhan data \base dan profil desa dan Kecamatan	Penyusunan Data Base dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya Data Base dan Profil desa/Kecamatan	8000000	6 buku	7500000	6 buku	8170000	6 buku	8000000	6 buku	11000000	6 buku	13000000	6 buku	14000000
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	MeningkatnyaPemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitaasi nya Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa (Tahun 2017 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2017)		2 desa	2000000			17 desa	34000000						
Meningkatnya Fasilitasi Program Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya Fasilitasi Program Pembangunan Perdesaan	Terwujudnya Fasilitasi Program Pembangunan Perdesaan	Terfasilitasinya Program Pembangunan Perdesaan	Terselenggaranya Fasilitasi Program Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan				19 Desa	19000000	19 Desa	19000000	19 Desa	19000000	19 Desa	19000000	19 Desa	19000000
Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Pembinaan Linmas se-Kecamatan Kutowinangun	Terselenggaranya Pembinaan Linmas se-Kecamatan Kutowinangun	Terwujudnya Anggota Linmas yang terlatih (Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)	2000000			19 Desa	9500000	19 Desa	9500000	19 Desa	9500000	19 Desa	7500000	19 Desa	8000000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (TKP2KDes)	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (TKP2KDes)	Tercapainya Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial DalamPenanggulangan KemiskinandanPenurunanKesenjangan(TKP2KDes)	Terlaksananya PelayanandanRehabilitasiKesejahteraan SosialDalamPenanggulanKemiskinandanPenurunanKesenjangan (TKP2KDes)	Tersedianya Data Kemiskinan	3000000	19 Desa	5700000	19 Desa	6650000	19 Desa	8000000	19 Desa	9000000	19 Desa	10000000	19 Desa	12000000
Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	2000000	19 Desa	3000000			19 Desa	4000000	19 Desa	7500000	19 Desa	8000000	19 Desa	9000000
Meningkatkan Pembinaan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan Sosial Masyarakat	Tewujudnya Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat	Terbinanya Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat, Terselenggaranya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Keagamaan		19 Desa	4000000	19 Desa	4500000	19 Desa	6000000	19 Desa	9000000	19 Desa	10000000	19 Desa	11000000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI Kecamatan		1 Kegiatan	9000000	1 Kegiatan	9000000	1 Kegiatan	10000000	1 Kegiatan	14000000	1 Kegiatan	15000000	1 Kegiatan	17000000
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Fasilitasi Program Pembangunan	Terwujudnya Kegiatan Partisipasi Masyarakat danFasilitasi Program Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya dan Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan APBDesa	21000000	19 Desa	43700000	19 Desa	26600000	19 Desa	27000000	19 Desa	30000000	19 Desa	32000000	19 Desa	34000000
			Terlaksananya Program Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Program Pembangunan Di Desa		19 Desa	8500000	19 Desa	7600000	19 Desa	9000000	19 Desa	15000000	19 Desa	18000000	19 Desa	20000000
Meningkatkan Kemampuan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kemampuan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tercapainya Kemampuan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Terbinanya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Administrasi Desa (Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)	4000000					19 Desa/ 3 Orang	10000000	19 Desa/ 3 Orang	15000000	19 Desa/ 3 Orang	15000000	19 Desa/ 3 Orang	15000000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Meningkatkan Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Meningkatnya Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Tercapainya Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Terfasilitasinya Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa (Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)						19 Desa	10000000	19 Desa	15000000	19 Desa	15000000	19 Desa	15000000
Meningkatkan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Kegiatan Peran Perempuan di Perdesaan	Terwujudnya Kegiatan Peran Perempuan di Perdesaan	Terlaksananya Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa	Terbinanya Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa	3000000	19 Desa	38000000	19 Desa	56800000	19 Desa	5000000	19 Desa	5000000	19 Desa	6000000	19 Desa	6000000
Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tercapainya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		12 Bulan	62615000	12 Bulan	54000000	12 Bulan	65000000	12 Bulan	70000000	12 Bulan	75000000	12 Bulan	80000000
Meningkatkan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Tercapainya Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Terwujudnya Kegiatan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Terselenggarannya Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik (INOVIK)						12 Bulan	5000000	12 Bulan	7000000	12 Bulan	9000000	12 Bulan	10000000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Meningkatkan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dan Rakor Program Pembangunan Masuk Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terfasilitasinya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	15000000	19 Desa	17100000	19 Desa	19000000	19 Desa	20000000	19 Desa	25000000	19 Desa	28000000	19 Desa	30000000
			Terlaksananya Rakor dan Inventarisasi Program Masuk Desa (IPMD)	Terinventarisirnya Program Masuk Desa (IPMD)	7000000	19 Desa	5000000	19 Desa	4750000	19 Desa	5000000	19 Desa	11000000	19 Desa	13000000	19 Desa	15000000

CAMAT KUTOWINANGUN

Drs. AGUS SUSANTO
Pembina Tk.I
NIP.19730815 199311 1 001

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kecamatan Kutowinangun dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.
Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Kondisi Awal Perencanaan (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (akhir 2020)
Indikator Kinerja Utama Daerah	Indikator Kinerja Program			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Tersedianya jasa surat menyurat (dokumen)		1000000	1200000	1300000	1800000	2100000	2400000	2600000	
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)		15000000	13000000	15000000	18000000	20000000	22000000	23000000	
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)		25000000	27000000	27000000	30000000	32000000	34000000	35000000	
	Tersedianya jasa administrasi perkantoran (orang)		11880000	15000000	16000000	19000000	21000000	23000000	25000000	
	Tersedianya jasa kebersihan kantor (paket)		3000000	3500000	3500000	5000000	6000000	7500000	9000000	
	Tersedianya jasa peralatan kerja (paket)		3000000	3000000	3000000	5000000	6000000	7000000	7500000	
	Tersedianya alat tulis kantor (Paket)		3500000	4000000	5000000	6000000	7000000	8000000	9000000	
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (paket)		3000000	3422000	3643000	5000000	6000000	7000000	8000000	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan banguunan kantor(paket)		2500000	2500000	2500000	4000000	5000000	6000000	6500000	
	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan (bulan)		1200000	1500000	1500000	1600000	1700000	1800000	1800000	
	Tersedianya makanan dan minuman (orang kali)		7000000	10000000	10000000	14000000	15000000	16000000	18000000	
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (orang kali)			2000000	2000000	4000000	4000000	4000000	5000000	
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (orang kali)		11200000	10000000	12000000	14000000	15000000	17000000	19000000	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur									
	Tersedianya kendaraan dinasoperasional (unit)(masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)					20000000	20000000	20000000		
	Tersedianya mebeleur kantor (unit)		4000000	4000000	4000000	5000000	10000000	15000000	20000000	
	Tersedianya sarana prasarana kantor (paket)		13000000	20500000	12000000	14000000	18000000	20000000		
	Terpeliharanya gedung kantor (unit)		22322000	66168000	4200000	40000000	40000000	50000000		
	Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor (paket)			7200000						
	Tersusunnya Renstra, Renja, LKJIP		3000000	4000000	6000000	7000000	10000000	12000000	14000000	

Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Kondisi Awal Perencanaan (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (akhir 2020)
Indikator Kinerja Utama Daerah	Indikator Kinerja Program			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Tersedianya Data Base dan Profil desa/Kecamatan		8000000	7500000	8170000	8000000	11000000	13000000	14000000	
	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa(Tahun 2017 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2017)			2000000	6000000		34000000			
	Terselenggaranya Fasilitasi Program Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan				19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	
	Terwujudnya Anggota Linmas yang terlatih(Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)		2000000			9500000	9500000	7500000	8000000	
	Tersedianya Data Kemiskinan		3000000	5700000	6650000	8000000	9000000	10000000	12000000	
	Terbinanya Organisasi Kepemudaan		2000000	3000000		4000000	7500000	8000000	9000000	
	Terbinanya Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat, Terselenggaranya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Keagamaan			4000000	4500000	6000000	9000000	10000000	11000000	
	Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI Kecamatan			9000000	9000000	10000000	14000000	15000000	17000000	
	Terfasilitasinya dan Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan APBDesa		21000000	43700000	26600000	27000000	30000000	32000000	34000000	
	Terfasilitasinya Program Pembangunan Di Desa			8500000	7600000	9000000	15000000	18000000	20000000	
	Terbinanya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Administrasi Desa(Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)		4000000			10000000	12000000	14000000	16000000	
	Terfasilitasinya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Administrasi Desa (Tahun 2018 masuk dalam renstra namun belum dapat didanai dengan pagu indikatif tahun 2018)					10000000	15000000	15000000	15000000	
	Terbinanya Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa		3000000	38000000	56800000	5000000	5000000	6000000	6000000	
	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			62615000	54000000	65000000	70000000	75000000	80000000	
	Terfasilitasinya program pengembangan Inovasi Pelayanan Publik (INOVIK)					5000000	7000000	9000000	10000000	
	Terfasilitasinya Musrenbangdes dan Musrenbangcam		15000000	17100000	19000000	20000000	25000000	28000000	30000000	
	Terinventarisirnya Program Masuk Desa (IPMD)		7000000	5000000	4750000	5000000	11000000	13000000	15000000	

Sumber :Data primer diolah

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kutowinangun selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan KutowinangunKabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan KutowinangunKabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kutowinangun berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kutowinangunberkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan KutowinangunTahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan KutowinangunTahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Kecamatan KutowinangunKabupaten Kebumen.

Kutowinangun, 21 September 2016
CAMAT KUTOWINANGUN

Drs. AGUS SUSANTO
Pembina Tk.I
NIP.19730815 199311 1 001